

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dari tahun ke tahun akan selalu dilakukan guna mewujudkan tujuan negara dengan salah satu bentuk pencapaiannya ialah menciptakan sebuah kesejahteraan. Menurut Sukirno (2015), Pembangunan nasional merupakan proses perbaikan perekonomian dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti meningkatkan taraf hidup atau menyempurnakan mutu kehidupan dan masyarakat yang bersangkutan. Kesejahteraan akan tercipta apabila tingkat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelumnya, tingkat sosial masyarakat maupun aspek-aspek yang lainnya juga menjadi lebih baik. Cara mengetahui bagaimana aspek-aspek tersebut meningkat ialah; dalam tingkat perekonomian misalnya dapat dikatakan baik apabila laju pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam tingkat sosial dapat dikatakan baik apabila tidak terdapat kesenjangan maupun perbedaan antara satu dengan lainnya.

Kemiskinan didefinisikan bentuk dari “kurangnya kesejahteraan”. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Pandangan ini lebih melihat kemiskinan dalam kaitannya dengan masalah keuangan (Haughton, 2012:1).

Badan Pusat Statistik (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan keadaan dimana seorang individu atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu. Pengukuran tingkat kemiskinan pada setiap negara cenderung berbeda, hal ini dikarenakan standar hidup layak dan kondisi sosial ekonomi pada setiap negara juga berbeda. Teori-teori kemiskinan klasik Bank Dunia 2 juga menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai konsep multi-dimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional mengenai kemakmuran. Hal tersebut seperti pendapatan, kesehatan dan keamanan.

Supartoyo, Yesi. (2013) menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan alam terbesar di dunia, namun hal tersebut belum menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya, kita dapat menilai dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Selain itu, diungkapkan juga bahwa Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki efek yang rendah bagi masyarakat sehingga kesejahteraan tersebut belum terjadi.

Kemiskinan merupakan masalah paling klasik yang terjadi di mayoritas negara berkembang di seluruh dunia, terlebih di Indonesia yang hingga saat ini belum dapat diatasi dengan maksimal sehingga masalah tersebut bersifat berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri masih mengkhawatirkan dimana angka-angkanya masih tinggi sehingga tingkat kemiskinan dalam skala nasional masih menjadi

masalah utama. Berikut merupakan data kemiskinan Indonesia dari tahun 2011-2017, masih pada angka yang sangat tinggi mekipun memang mengalami penurunan.



Gambar 1.1 Jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2017

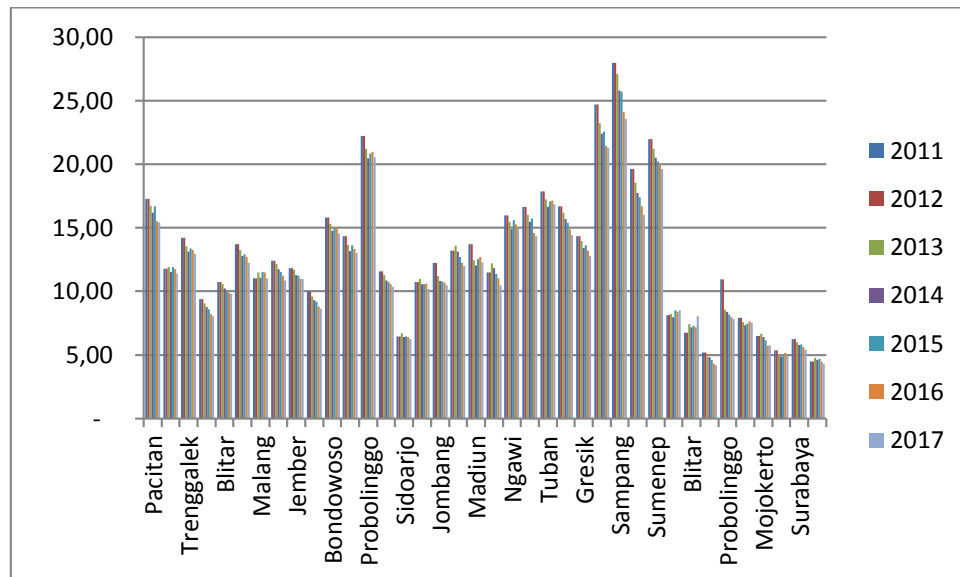
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. Data diolah)

Melalui data diatas, diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2017 mengalami penurunan namun masih pada angka yang cukup tinggi, salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan adalah adanya pengaruh faktor IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zuhdiyati (2017) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia dimana terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu IPM, Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasilnya menunjukkan bahwa dua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia, sedangkan variabel yang lain yaitu Indeks Pembangunan Manusia

mempengaruhi jumlah kemiskinan secara negatif yang artinya antara kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang terbalik yaitu ketika Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan sebesar 1%, maka kemiskinan naik sebesar 28% artinya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

Sesuai dengan apa yang menjadi masalah utama ditingkat nasional, bahwa kemiskinan masih dalam angka yang tinggi, maka bukan sesuatu yang mengejutkan jika hal tersebut juga terjadi di banyak daerah-daerah besar di Indonesia. Andai kita dapat menyebut Indonesia sebagai negara berkembang, namun kita juga tidak dapat menampik jika Indonesia merupakan negara yang besar dengan memiliki total 34 provinsi berbentuk pulau-pulau yang terbentang dari sabang hingga merauke dengan sumber daya alam yang melimpah, artinya dengan luasnya wilayah, kekayaan alam serta banyaknya penduduk yang dimiliki Indonesia maka akan dirasa tidak seimbang dengan tingginya angka kemiskinan. Salah satu sebab hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan kualitas manusianya.

Salah satu pulau dengan jumlah penduduk beserta kegiatan ekonomi terpadat ialah Pulau Jawa. Idealnya, suatu wilayah dengan pusat aktivitas ekonomi yang besar akan memberikan dampak yang baik pula bagi sekitarnya. Realita yang terjadi tidak demikian, dimana jumlah kemiskinan terbesar rata-rata terjadi di Provinsi dengan fasilitas penunjang ekonomi yang baik, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tetap lebih tinggi daripada dua provinsi besar yang lainnya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berikut merupakan data persentase kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan kabupaten/kota:



Gambar 1.2 Persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2011-2017
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017. Data Diolah).

Salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar di Indonesia ialah Provinsi Jawa Timur bahkan berada pada posisi tiga besar setelah Provinsi Jawa Barat. Melalui data di atas disebutkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berada dalam angka yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain dimana hal tersebut sangat disayangkan mengingat sumber daya alam maupun meningkatnya aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Timur yang terus berkembang dari tahun ke tahun melalui banyak sektor yang bisa menyokong perekonomiannya. Profil Kemiskinan Jawa Timur (2017) menyebutkan bahwa kemiskinan Jawa Timur periode 2017 mengalami penurunan kecuali yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015. Salah satu pemicu peningkatan kemiskinan pada tahun 2013 dan 2015 tahun tersebut ialah kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Fenomena yang terjadi di daerah-daerah yang memiliki angka kemiskinan yang besar justru daerah dengan potensi dan aktivitas ekonomi yang

besar pula, maka hal tersebut juga yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura merupakan salah satu daerah dengan hasil alam serta potensi pariwisata yang baik di Provinsi Jawa Timur. Data kemiskinan Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura yaitu; Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep masing-masing memiliki jumlah yang besar terhadap persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya. Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten dengan angka kemiskinan yang terendah daripada kabupaten lainnya di Pulau Madura, namun masih berada dalam angka yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Upaya pengentasan kemiskinan sebenarnya telah dilakukan. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten telah melakukan upaya melalui kebijakan-kebijakan dalam pengentasan kemiskinan terhadap kabupaten-kabupaten tersebut, diantaranya; Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki program “Jalin Mantra” atau jalan lain menuju mandiri dan sejahtera yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi yang kemudian digerakkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2015. Berbeda dengan kabupaten lainnya, dengan mengusung Program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mengaplikasikan program PKH atau Program Keluarga Harapan dan KUBE atau Kelompok Usaha Bersama yang mana diadakan untuk seluruh lapisan masyarakat baik itu di perkotaan, pedesaan hingga wilayah pesisir. Namun dengan serangkaian program tersebut, ternyata tidak cukup untuk mengurangi

tingkat kemiskinan secara signifikan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura dibandingkan dengan daerah yang lain di Jawa Timur.

Paradigma penanggulangan kemiskinan pada saat ini bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan berhasil apabila “kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan.” Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijaksanaan, organisasi dan program yang tepat. Sejalan dengan hal tersebut menjadi alasan yang cukup kuat mengapa penelitian ini dilakukan, terlebih keempat kabupaten tersebut memiliki persentase kemiskinan yang tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Maxwell dari *School Of Syracuse University* menyatakan bahwa teori penyebab kemiskinan atau *couse of poverty theory* secara garis besar, penyebab atau faktor kemiskinan ialah terdapat pada dua jenis, yakni; individu dan agregat. Pada faktor individu yang dimaksud disini adalah faktor yang berkaitan dengan individu secara langsung, seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman, kecerdasan, kesehatan, usia, orientasi kerja, budaya kemiskinan, diskriminasi (gender, rasa cacat atau agama) serta jenis kelamin. Selain faktor individu, terdapat juga faktor agregat.

Faktor penentu kemiskinan secara agregat dapat berupa faktor-faktor ekonomi yang lebih luas, diantaranya seperti kegagalan pasar dimana hal ini tentunya terkait dengan penawaran dan permintaan yang tidak seimbang, ketersediaan kesempatan kerja yang layak dan pendapatan nasional yang rendah. Moeis (2006) menyatakan bahwa faktor penentu atau yang disebut determinan kemiskinan diantaranya; sektor

ekonomi yang meliputi pendapatan, nutrisi dan perumahan, kemudian dari sektor sosial yang meliputi rasa keterasingan dan merasa tidak aman, serta faktor politik dan budaya juga berpengaruh seperti tingkat pendidikan dan kepercayaan diri. Sedangkan faktor-faktor kemiskinan menurut *world bank* (2002) dapat berupa karakter makro, sektor, komunitas, rumah tangga serta individu. Karakteristik makro, determinan kemiskinan dapat berupa potensi daerah, tingkat inflasi dan lain-lain. Pada karakteristik sektoral, determinan kemiskinan dapat berupa tingkat pengangguran, pendidikan atau kontribusi sektor primer terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada karakteristik komunitas, determinan kemiskinan dapat berupa infrastruktur. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, menurut *world bank* kemiskinan juga dipengaruhi oleh karakteristik geografis.

Pulau Madura terpilih sebagai daerah kajian dalam penelitian ini tentunya dengan memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, kenyataan bahwa kemiskinan di Pulau Madura masih sangat tinggi dan hal tersebut berdasarkan pada teori serta beberapa penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa penyebab yaitu; Sebagian besar di beberapa daerah di Jawa Timur termasuk di Pulau Madura Sendiri, Indeks Pembangunan Manusia masih tergolong rendah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan yang dilansir oleh berita bahwa penyebab terbesar kemiskinan di Bangkalan adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan indikator capaian pembangunan manusia sehingga hal tersebut terkait terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah. Kedua, kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga terjadi di Pulau Madura akan menyebabkan

sebagian masyarakatnya kurang mumpuni untuk sejalan dengan pertumbuhan yang ada tersebut sehingga besar kemungkinan masyarakat miskin akan terus bertambah. Maka sejalan dengan hal tersebut dapat kita identifikasi bahwa pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Ketiga, Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya juga mempengaruhi pada konsep kebijakan pemerintah yang telah dilakukan, sebagian besar menghambat terhadap pembangunan oleh pemerintah tersebut, maka dengan pembangunan yang terhambat tersebut dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Terakhir, tingkat pengangguran yang ada juga terindikasi akan menambah tingkat kemiskinan, dimana semakin banyak tingkat pengangguran yang ada maka pendapatan masyarakat semakin menurun sehingga menuju kepada kemiskinan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura?
3. Apakah Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura?
4. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Atas perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan seluruh kabupaten di Pulau Madura, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Adanya pergantian kedudukan kepala daerah Provinsi Jawa Timur dan beberapa kabupaten secara serentak otomatis kebijakan juga akan terus diperbaharui. Dengan adanya penelitian ini dimaksudkan supaya terdapat referensi serta pengetahuan mengenai informasi terbaru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seluruh kabupaten di Pulau Madura sesuai dengan teori yang telah dikaji.

b. Bagi Lingkungan Akademik

Untuk dapat dijadikan bahan serta acuan dalam memberikan pengetahuan dan pengembangan terhadap mahasiswa(i) di lingkungan kampus dalam proses perkuliahan.

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memahami lebih lanjut mengenai penelitian ini, maka terdapat beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian serta tujuan penelitian. Membahas mengenai isu utama penelitian yang didukung oleh fakta-fakta serta data terkait, serta penegasan judul penelitian.

Bab dua merupakan kajian teori yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian terdapat pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen, penelitian-penelitian yang terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta perumusan hipotesis.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis dan sumber data penelitian, variabel dan desain penelitian, populasi dan sampel data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab empat merupakan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan yang kemudian diinterpretasi hasil perhitungan tersebut dalam pembahasan pada setiap variabel dari penelitian ini. Diantaranya uji model, uji hipotesis dan lain-lainnya

sehingga ditemukan jawaban atas pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen.

Bab lima merupakan kesimpulan beserta saran dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai hasil penelitian.